

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PEMENUHAN HAK
PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR H SOEWONDO KENDAL**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh :

Hesti Sulistyaningsih

NIM: 22.C2.0112

**KEPADA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

Abstrak

UUD 45 Pasal 28H ayat (1), menyebutkan setiap orang memiliki hak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 34 disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban negara adalah *to respect, to protect dan to fulfill* hak warga negara. Berbagai peraturan sudah diupayakan dari tingkat pusat hingga daerah, namun permasalahannya di Kabupaten Kendal tahun 2019-2023 masih banyak pasien miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Sehingga saat sakit kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Menyikapi kondisi tersebut dibuat suatu kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kendal dan RSUD dr H Soewondo untuk memenuhi hak pelayanan pasien miskin.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analitik terhadap pengaturan terkait dan pelaksanaan serta faktor yang mempengaruhi peran Baznas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan pasien miskin di RSUD Kendal. Dengan cara wawancara dan analisa dari beberapa pengambil kebijakan terkait, pelaksana serta penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan peran Baznas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan pasien miskin, terkait dengan pengaturan :Perbub Kendal No 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda, Perbub Kendal 23 Tahun 2024 tentang Optimalisasi JKN dalam pemenuhan *Universal Health Coverage*, Perbazznas No 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pengumpulan Zakat, Perbazznas No 3 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan dan Distribusi Zakat, Surat Edaran dan Instruksi Bupati Kendal tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, serta Perjanjian Kerjasama RSUD Kendal dan Baznas Kendal. Pelaksanaan pengaturan sudah sesuai harapan dan didukung oleh banyak pihak, baik dari pelaksana maupun pemerintah desa, relawan sosial dan masyarakat. Sedikit hambatan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan beberapa perangkat yang kurang terlibat.

Simpulan penelitian ini regulasi yang terkait sudah cukup mengatur peran Baznas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan pasien miskin, beberapa hambatan dapat diupayakan kembali dengan peningkatan kesadaran pemberi zakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian sesuai kebutuhan.

Kata kunci: hak kesehatan, kebijakan, BAZNAS pasien miskin

Abstract

UUD 45 Article 28H paragraph (1), states that every person has the right to live in prosperity and to a decent and healthy living environment and the right to obtain health services. Furthermore, Article 34 states that the poor and neglected children are cared for by the state. The state's obligation is to respect, to protect and to fulfill the rights of citizens. Various regulations have been attempted from the central to regional levels, but the problem is that in Kendal Regency in 2019-2023 there are still many poor patients who do not have health insurance. So when you are sick you have difficulty accessing health services. In response to this condition, a collaboration between the Kendal National Amil Zakat Agency and Dr. H Soewondo Regional Hospital was created to fulfill the service rights of poor patients.

This qualitative research uses analytical descriptive methods on related arrangements and implementation as well as factors that influence the role of Baznas in fulfilling the health service rights of poor patients at Kendal District Hospital. By means of interviews and analysis from several related policy makers, implementers and beneficiaries.

The research results show the role of Baznas in fulfilling the health service rights of poor patients, related to the regulations: Kendal Regency Regulation No. 70 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Jamkesda, Kendal Regency Regulation 23 of 2024 concerning Optimizing JKN in fulfilling Universal Health Coverage, Perbaznas No. 2 of 2016 concerning Governance of Zakat Collection, Perbaznas No. 3 of 2018 concerning The Utilization and Distribution of Zakat, Circular Letters and Instructions Regent of Kendal regarding optimizing zakat collection, as well as the Cooperation Agreement between Kendal Regional Hospital and Kendal Baznas. The implementation of the arrangements has met expectations and is supported by many parties, both from implementers and village government, social volunteers and the community. There are a few obstacles from the lack of public awareness regarding zakat and some devices that are less involved.

The conclusion of this research is that the relevant regulations are sufficient to regulate the role of Baznas in fulfilling the health service rights of poor patients. Some obstacles can be overcome by increasing awareness of zakat givers and evaluating the implementation of agreements according to needs.

Key words: health rights, policy, BAZNAS poor patients